

NAMA : AHMAD SENO ANDRIANTO

NIM : 115030200111130

KELAS : A

Peran Kapitalis, Sosialis dan Pancasila dalam Hubungan Industrial

## 1. Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Dalam nah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian, seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam perekonomian kapitalisme menekankan peran modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya.

Sistem ekonomi kapitalis :

- Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
- Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
- Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
- Campur tangan pemerintah sangat minim
- Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi

## 2. Sosialisme

Sosialis adalah dilandasi pada kegiatan kapitalis yang dipelopori oleh Karl Marx. Menurut Marx keuntungan oleh perusahaan seharusnya dinikmati oleh seluruh anggota organisasi, akan tetapi pada kenyataannya tidak. Keuntungan hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya dari masalah tersebut muncul pertentangan politik dalam organisasi sehingga menjadi pertentangan diluar organisasi. Pada kenyataannya meskipun sudah turun ke jalan buruh tetap tidak bisa merubah nasibnya, karena polisi (aparat) dan birokrasi (pemerintah) dibayar oleh perusahaan.

Dalam penerapannya negara sosialis seperti china, korea, dan rusia banyak yang kapitalis. Sistem politiknya Sosialis akan tetapi sistem ekonominya Kapitalis. Peran Sosialis adalah lebih mudah untuk mengendalikan masalah-masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya karena pemerintah berperan besar dalam mengendalikan seluruh kegiatan Negara maupun masyarakat. Lancarnya kegiatan pasar barang, pembentukan harga pasar atas ikut campurnya pemerintah, dan jarang nya krisis ekonomi yang terjadi.

Sistem ekonomi sosialis :

- Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi

- Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
- Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
- Campur tangan pemerintah sangat tinggi
- Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
- USSR

### 3. Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yang berasal dari Bahasa Sanksekerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Indonesia dalam konteksnya lebih ke kapitalis walaupun indonesia menganggap dirinya sebagai negara pancasila. Di dalam negara Pancasila mengenal adanya partnership di dalam perusahaan.

Dalam proses produksi secara konstitusional-institusional sudah ada pendekatan sistemik dalam bentuk Hubungan Industrial Pancasila. Dari sisi pengusaha, maka mereka mempunyai hak milik dalam memproduksi (ekonomi) namun berfungsi sosial, mengembangkan usaha dan laba, hal mengelola modalnya dan selanjutnya berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah dalam konteks hubungan industrial Pancasila berkedudukans sebagai pengasuh, pelindung, pengayom dan pendamai, sekaligus berkewajiban dalam peningkatan kesejahteraan umum, pelayanan publik, dan kenyamanan serta keamanan umum.

Dari segmen ketenagakerjaan, maka hubungan industrial Pancasila menempatkan posisi perwakilan pekerja dalam kelembagaan perburuhan sebagai penyalur aspirasi dengan hak misalnya berorganisasi, hak melaksanakan kesepakatan kerja, secara kolektif menyatakan pendapat atas kondisi kerja, hak perlindungan lainnya, dan berkewajiban mengamankan kepentingan perusahaan atas pesaing dan sekaligus membawa pekerja aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Terdapat dua pola hubungan yang ideal ini yakni "bipartit dan tripartit". Institusionalisasi hubungan industrial Pancasila bipartit yakni dari aspek internal perusahaan yakni adanya komunikasi yang aktif dan konstruktif antara pengusaha pemilik dengan manajemen, dan antara manajemen dengan pekerja, dan antara pemilik dengan pekerja terutama dalam menempatkan ketiga "stake

holders" perusahaan ini dalam satu kesatuan kepentingan (keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja).

Sedangkan kelembagaaan tripartit berkaitan dengan hubungan external-internal perusahaan yang didalamnya terdapat institusi Pemerintah yang merepresentasi kepentingan umum, dan kebijakan publik. Sebagai forum komunikasi dua arah dan dialog tiga tungku pembangunan ini selanjutnya diikuti dalam bentuk kesepakatan kerjasama.